



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, DAN BPLS)**

Tahun Sidang : 2009 - 2010
Masa Sidang : II
Rapat : Ke – 20 (dua puluh)
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal : Kamis, 11 Februari 2010
Sifat : Terbuka
Pukul : 14.00 s.d 17.00 wib
Tempat : Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V)
Acara : Evaluasi dan rencana program serta perkembangannya di setiap lembaga pendidikan di bawah Badan Diklat Perhubungan
Ketua Rapat : Drs. Yoseph Umarhadi, Msi, MA
Sekretaris : Dra. Hani Yuliasih
Hadir Anggota : dari 53 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra : Kepala Badan Diklat Perhubungan dan para Direktur/Kepala Sekolah Tinggi/Lembaga Pendidikan Perhubungan beserta jajaran terkait.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pukul 14.00 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua menyampaikan agenda rapat kerja hari ini adalah evaluasi dan rencana program serta perkembangannya di setiap lembaga pendidikan di bawah Badan Diklat Perhubungan.
3. Ketua mempersilakan Kepala Badan Diklat Perhubungan Kementerian Perhubungan untuk menyampaikan paparannya.
4. Ketua mempersilakan anggota Komisi V untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

1. Komisi V DPR RI mendesak Badan Diklat Perhubungan untuk memperhatikan daya serap anggaran dimana sampai per 31 Desember 2009 sebesar Rp 1,293 trilyun atau 86 % dari total APBN TA 2009 sebesar Rp 1,503 trilyun, selanjutnya Komisi V DPR RI meminta agar Badan Diklat Kementerian Perhubungan untuk berupaya meningkatkan daya serapnya pada TA 2010 dengan melakukan perencanaan/ pelaksanaan anggaran secara cermat dan tepat.

2. Komisi V DPR RI menyatakan keprihatinan yang mendalam atas terjadinya pemblokiran Anggaran sebesar Rp 778,04 Miliar atau sekitar 60 % dari total DIPA 2010 sebesar Rp 1,472 Trilyun yang terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai sebesar Rp 24,61 milyar,
 - b. Belanja Barang sebesar Rp. 35,649 milyar dan
 - c. Belanja Modal sebesar Rp. 717,8 milyarSelanjutnya Komisi V DPR RI mendesak Badan Diklat Perhubungan untuk segera menyiapkan dan memenuhi semua persyaratan pencairan kepada Kementerian Keuangan dan melakukan evaluasi terjadinya pemblokiran agar tidak terulang pada Tahun Anggaran Berikutnya.
3. Komisi V DPR RI mendesak Badan Diklat Perhubungan untuk melakukan terobosan dalam hal penguatan pembiayaan diklat diantaranya menjalin kerjasama dengan swasta penyelenggara transportasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Badan Diklat Perhubungan atas kinerjanya menghasilkan Sumber Daya Manusia Handal dalam bidang transportasi untuk melayani kepentingan Dalam Negeri maupun Luar Negeri. Selanjutnya Komisi V DPR RI mendorong Badan Diklat Perhubungan Kementerian Perhubungan meningkatkan standar mutu lulusannya diantaranya dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, penyempurnaan kurikulum, dan implementasi ketentuan-ketentuan Internasional bidang Transportasi.
5. Komisi V DPR RI mendesak Badan Diklat Perhubungan untuk mengkaji pengembangan dan pendirian Sekolah Tinggi/ Lembaga Pendidikan Perhubungan yang lebih merata di wilayah NKRI.
6. Terkait dengan *kekurangan* kebutuhan Sumber Daya Manusia di bidang Perhubungan, Komisi V DPR RI mendorong Badan Diklat Perhubungan untuk melakukan pencapaian target pada tahun 2014 secara terukur sehingga segala kebutuhan terpenuhi dengan tetap memperhatikan kualitasnya.
7. Komisi V DPR RI mendesak Badan Diklat Perhubungan untuk melakukan pengawasan secara sungguh-sungguh, terkait Sistem Pendidikan yang dilaksanakan pada Sekolah Tinggi/ Lembaga Pendidikan Perhubungan, dengan penegakan disiplin yang lebih manusiawi dan pembinaan fisik para Taruna secara proporsional. Selanjutnya Komisi V DPR RI mendesak Badan Diklat Perhubungan agar kasus-kasus kekerasan yang terjadi selama ini tidak terulang kembali.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.00 WIB.

Jakarta, 11 Februari 2010

KETUA RAPAT,

ttd

DRS. YOSEPH UMARHADI, MSI, MA

